



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

Kamis, 2 September 2021

Edisi: 00226433/GBR/IX/2021

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM. No 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telp. (021) 7806 131 Ext. 2303, 2308, Email : humas-ip@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

KAMIS, 2 SEPTEMBER 2021

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. TANAMAN PANGAN :
 - Bulir Padi dalam Catatan Sejarah Negeri (K).....13-14
2. HORTIKULTURA :
 - Harga Cabai Anjlok akibat Konsumsi Turun (MI)..... 1
 - Kementan Jaga Harga Cabai (R)..... 2-3
3. PERKEBUNAN :
 - Petani Nikmati Tingginya Harga Tandan Buah Sawit (ID)..... 4
4. LITBANG PERTANIAN :
 - Gobel: Ajak Milenial Terjun Jadi Petani (RM)..... 5
 - Jokowi: Kembangkan Agromaritim Berbasis Inovasi dan Teknologi (ID)..... 6-7
5. KETAHANAN PANGAN :
 - Harga Gabah Petani Naik 3,19% (ID)..... 8
 - Di Balik Petai, Jengkol, dan Asiri (K)..... 15
6. PERTANIAN UMUM :
 - Kesejahteraan Petani Meningkat (MI)..... 9-10
 - BRIN, Mengatasi Masalah dengan Masalah (MI)..... 11-12
 - Suara Pembaca Pertanian Tetap Kokoh (BI)..... 16

00000000 O 00000000

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 2/5/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Harga Cabai Anjlok akibat Konsumsi Turun

DIREKTUR Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementerian Pertanian Bambang Sugiharto mengatakan siklus harga yang naik-turun sebetulnya sudah biasa dialami komoditas pertanian. Hal ini terjadi lantaran kondisi permintaan yang tidak sebaik pada masa sebelumnya.

"Harga cabai rawit dan cabai merah Januari 2021 di tingkat petani itu mencapai Rp50.000 per kg, Februari naik Rp60.000, Maret Rp80.000 bahkan beberapa daerah ada yang sampai Rp100.000. Tapi April turun lagi menjadi Rp50.000, Mei Rp30.000, Juni Rp20.000, dan Juli sampai sekarang mencapai Rp10.000," ungkapnya

dalam acara diskusi bersama wartawan di Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura, Jakarta, kemarin.

Bambang menambahkan, penurunan harga cabai pada periode Juli-Agustus 2021 disebabkan produksi cabai yang cukup baik dari petani, tapi tidak didukung permintaan dari masyarakat karena kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya menghadirkan beberapa solusi agar pendapatan para petani cabai tidak ikut anjlok dalam keadaan PPKM.

"Di antaranya kita lang-

sung serap cabai dari petani. Petani yang melaporkan harga rendah langsung kita beli misalnya dari Temanggung, Kebumen, dan lainnya. Kita juga bantu simpan dan kita pasarkan ke beberapa sektor, seperti industri kita pasarkan ke Indofood. Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) juga ikut menyerap," tegas Bambang.

Langkah lainnya yang dilakukan, kata Bambang, ialah mendatangi mitra kerja kementerian lain agar pegawainya ikut menyerap. Lalu, ada kegiatan pasar tani, yakni ada 100 unit pasar tani yang tersebar di seluruh Indonesia. Ke depan, Bambang juga mene-

gaskan bahwa pihaknya akan mendorong pengolahan cabai dalam bentuk jadi.

Di tempat yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura Retno Sri Hartati Mul-yandari menekankan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya untuk mengedukasi para petani cabai untuk mengolah hasil panen menjadi produk jadi.

Selain itu, menurutnya, dalam kondisi menurunnya harga komoditas, semua pihak dapat ikut berkontribusi agar permasalahan ini dapat teratasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah ikut menyerap komoditas tersebut. (Des/E-3)

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 2/5/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Kementan Jaga Harga Cabai

Produksi aneka cabai nasional periode Januari hingga Juli 2021 mengalami surplus.

JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengantisipasi penurunan harga cabai salah satunya dengan menyerap langsung hasil produksi petani. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Bambang Sugiharto mengatakan, sejumlah strategi yang dilakukan Kementan ialah melakukan penyerapan langsung kepada petani di sejumlah daerah.

"Petani yang lapor harga terlalu jatuh kita langsung beli seperti di Temanggung dan Kebumen, Jawa Tengah," ujar Bambang dalam acara *coffee morning* di Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (1/9).

Bambang mengatakan, produksi aneka cabai nasional periode Januari hingga Juli 2021 masih surplus. Produksi cabai pada Juli tercatat sebanyak 163.293 ton dengan kebutuhan sebesar 158.855 ton atau surplus 4.439 ton.

Kementan mencatat, produksi cabai relatif cukup baik tahun ini. Akan tetapi, permintaan menurun karena adanya PPKM. Sementara itu, komoditas cabai harus cepat dijual karena mudah rusak. Hal ini turut mempengaruhi pergerakan harga cabai.

Bambang menyampaikan, harga cabai rawit merah di tingkat petani pada Januari 2021 masih sebesar Rp 50 ribu per kg. Kemudian, pada Februari sebesar Rp 60 ribu per kg, dan melonjak pada Maret mencapai Rp 80 ribu per kg. Kemudian harga cabai rawit kembali mengalami penurunan pada April sebesar Rp 50 ribu per kg,



SERAP CABAI PETANI Pekerja di Horti Mart di area kantor Dirjen Hortikultura, Kementan memperlihatkan cabai yang diserap dari petani di sejumlah sentra cabai Tanah Air. Serapan cabai ini merupakan strategi Kementan dalam menjaga stabilitas harga dan produksi cabai.

Juni sebesar Rp 20 ribu per kg, dan Agustus berada di bawah Rp 10 ribu per kg. Padahal, Bambang menyebut, untuk balik modal petani memerlukan harga jual cabai rawit berada di kisaran Rp 11 ribu hingga Rp 13 ribu per kg.

"Petani yang penting ada yang beli di atas upah petik yang sebesar Rp 3.500 per kg meski di bawah balik modal agar tidak tekor. Kemarin harga balik modal itu Rp 11 ribu per kg, kita (Kementan) beli Rp 13 ribu per kg agar mendorong harga naik kembali," ucap Bambang.

Bambang menyebut, Kementan telah melakukan penyerapan cabai sebanyak 10 ton. Industri pun ikut membantu menyerap hasil cabai petani salah satunya Indofood yang meningkatkan serapan dari 10 ton hingga 15 ton per hari menjadi 30 ton.

Kementan juga menggandeng ke-

mentarian atau lembaga lain untuk ikut menyerap cabai. Saat ini, Kementan telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, BIN, dan Polri dalam membantu serapan cabai petani. Bambang juga mengapresiasi komitmen industri untuk ikut menyerap cabai petani.

"Setiap tahun kita telah alokasi anggaran ke dinas-dinas untuk menyerap produk pertanian melalui pasar tani. Ada 100 unit pasar tani untuk mengatasi gejolak harga di tingkat lokal," ungkap Bambang.

Selain itu, sejak tahun lalu, Kementan telah membagikan 40 unit *cold storage* atau gudang berpendingin berkapasitas empat ton sampai lima ton untuk beberapa sentra produksi cabai seperti di Magelang, Kediri, dan Jember.

Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Retno Sri Hartati Mulyan-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 2/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

dari mengatakan, dari sektor pasokan tidak ada masalah lantaran produksi cabai justru surplus. Retno menjelaskan, siklus pada Juli dan Agustus biasanya permintaan cabai relatif cukup tinggi akibat kegiatan masyarakat berupa resepsi dan liburan. Hal ini dalam kondisi normal akan mendorong permintaan cabai dari sektor hotel, restoran, dan katering (Horeka).

"Situasi Juli-Agustus, banyak hajatan dan liburan yang berimplikasi pada konsumsi cabai. Tapi realitanya sepi," ucap Retno.

Menurut Retno, para petani pun memahami kondisi ini. Retno berharap kondisi perekonomian dapat membaik saat petani kembali melakukan panen cabai agar bisa terserap secara maksimal. Retno optimistis hal ini dapat terjadi mengingat situasi penanganan Covid-19 yang terus membaik dan mulai terjadi pelonggaran PPKM.

Selain melakukan penyerapan, sambung Retno, Kementan juga terus mengedukasi petani untuk melakukan pengolahan cabai. Kementan memberikan bimbingan teknis cara membuat cabai kering saat produksi sedang melimpah.

"Petani harus aktif mengolah saat produksi cabai sedang berlimpah," ucap Retno.

Kepala Biro Humas Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan Kementan menaruh fokus dalam menjaga stabilitas pasokan maupun harga cabai. Kuntoro mengapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan Ditjen Hortikultura, baik dengan penyerapan maupun pendampingan pengolahan cabai.

"Kondisi ini tidak separah tahun lalu, (anjloknya harga cabai) hanya terjadi di Jepara dan Rembang, Jawa Tengah kemudian di beberapa wilayah di Jawa Barat. Tapi, di pasar-pasar utama di Jakarta dan beberapa kota besar harga masih dalam kisaran normal. Sementara di beberapa wilayah sentra produksi lainnya di Jawa Timur dan luar Jawa, harga di tingkat petani masih stabil dan tinggi (menguntungkan petani-red)," ujar Kuntoro.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

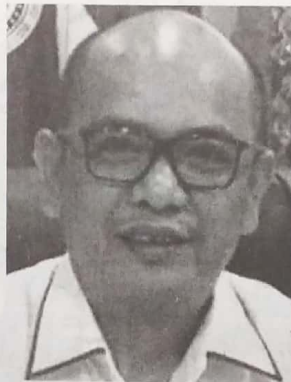
MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 2/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Petani Nikmati Tingginya Harga Tandan Buah Sawit

JAKARTA—Petani sawit mendapatkan kado terindah sepanjang sejarah Republik Indonesia (RI), sampai pertengahan tahun ini harga tandan buah segar (TBS) terus tinggi yang berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Tahun lalu, harga TBS sawit sempat hanya di level Rp 600 per kilogram (kg), namun tahun ini sudah menembus Rp 2.000 per kg.

Laporan dari anggota DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di 22 provinsi dan 136 kabupaten di Indonesia menunjukkan tren positif harga TBS sawit. Di sejumlah provinsi yang biasanya menerima harga TBS di bawah Rp 1.000 per kg, tahun ini di Banten saja menembus Rp 1.800 per kg pada periode 16-22 Agustus 2021. Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, kenaikan harga TBS merupakan kado terindah yang pernah ada sejak Indonesia berdiri dan baru tahun ini petani bisa menikmati manisnya harga TBS. "Tahun lalu, harga TBS yang diterima petani hanya Rp 600 per kg dan kami bersyukur tahun ini dapat harga bagus," ujar Gulat dalam keterangannya,



Gulat Manurung

kemarin.

Di Kalimantan Selatan, petani juga mendapatkan berkah tingginya harga TBS. Per 16 Agustus 2021, harga TBS yang ditetapkan provinsi tersebut Rp 2.100 per kg, di pabrik harga pembelian bisa mencapai Rp 2.300-2.400 per kg. Demikian juga di Kalimantan Barat, sampai periode Agustus 2021, harga tertinggi TBS Rp 2.542 per kg. Di Jambi, harga TBS petani menyentuh Rp 2.620 per kg selama periode 13-19 Agustus 2021, di periode yang sama tahun lalu hanya Rp 1.870 per kg. Di Riau, harga TBS juga mencetak rekor Rp

2.730 per kg.

Sementara itu, harga TBS periode 11-17 Agustus di Sumatera Utara Rp 2.769 per kg, di Sumatera Selatan harga TBS penetapan provinsi naik menjadi Rp 2.498 per kg untuk periode pertama Agustus. Di Sulawesi Tengah, harga TBS Rp 2.345 per kg jelang akhir Agustus sedangkan tahun lalu di bawah Rp 1.500 per kg. Apkasindo tidak kaget dengan tingginya harga TBS sampai Agustus tersebut mengingat harga CPO di pasar global juga akan melandai setelah Pemerintah Indonesia menyesuaikan pungutan ekspor.

Gulat juga mengatakan, disahkannya UU Cipta Kerja menjadi gerbang keberlanjutan sawit Indonesia, kebijakan pungutan ekspor yang disesuaikan dalam PMK 76/2021 juga dinilai mampu menyeimbangkan antara industri hulu dan hilir kelapa sawit. Program peremajaan sawit rakyat (PSR) pun mampu mendorong petani untuk meremajakan tanaman usia tua, mandatori biodiesel melalui campuran 30% atau B30 dapat meningkatkan konsumsi sawit di dalam negeri. (dho) 10.7

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☒ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 2/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 7/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☒ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Dunia Dibayangi Krisis Pangan Gobel: Ajak Milenial Terjun Jadi Petani

WAKIL Ketua DPR Rachmat Gobel mendorong pemerintah membangun ekosistem pertanian untuk para milenial. Pertanian merupakan fondasi ekonomi nasional, sehingga ekosistem dan regenerasi di sektor tersebut merupakan masalah strategis yang harus diselesaikan.

"Harus ada solusi terintegrasi. Nggak bisa sepotong-sepotong. Kita harus membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, dari soal modal dan inovasi teknologi hingga diversifikasi produk hilir pertanian," ujar Gobel dalam webinar bertajuk "Jadi Petani Milenial, Kenapa Tidak?", kemarin.

Selain Gobel, webinar tersebut menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Wakil Dirut Bank BNI Adi Sulistyowati, dan Guru Besar IPB Prof Hermanto Siregar.

Webinar ini dilatari oleh terus berkurangnya jumlah petani berusia muda dan menuanya usia petani.

Melanjutkan keterangannya, Gobel mengajak kaum milenial untuk terjun menjadi petani. Sektor pertanian merupakan fondasi ekonomi nasional yang menyerap banyak tenaga kerja, serta menjaga harkat dan martabat bangsa. *RM - 7*

"Di tengah pandemi ini, para petani tetap memberi kita ma-

kan, sehingga tidak mengemis ke bangsa lain. Perspektif seperti ini harus dipahami generasi muda, sehingga dunia pertanian menarik untuk diteliti sebagai profesi yang atraktif," jelas politisi Partai Nasdem ini.

Lebih lanjut, Gobel menguraikan, perubahan iklim dan terus bertambahnya penduduk, membuat dunia dibayangi

masa krisis pangan di masa depan. Karenanya, sebagai negara yang memiliki lahan luas dan subur, Indonesia harus mengambil peran sebagai lumbung pangan dunia.

Namun demikian, ungkap Gobel, berdasarkan kunjungannya ke berbagai daerah di Indonesia, masih banyak persoalan rutin yang dihadapi para petani. Di antaranya, saat masa tanam kesulitan mendapat pupuk dan bibit, kemudian saat panen harga jual komoditas pertanian jatuh.

"Hal-hal seperti itu, membuat petani menghadapi persoalan di luar masalah bercocok tanam. Itu di luar kendali mereka. Salah satu solusinya, kelembagaan petani harus diperkuat melalui lembaga, seperti koperasi," jelas dia.

Selain itu, menurut dia, petani juga kerap menghadapi kesulitan permodalan dan keterbatasan sentuhan tekno-

logi pertanian, seperti traktor dan mesin pengering gabah. Produktivitas komoditas juga masih rendah, sehingga sektor pertanian tidak atraktif secara ekonomi.

Gobel menyarankan adanya inovasi untuk meningkatkan kualitas bibit, pupuk, dan peralatan pertanian. Ia pun menyampaikan pengalamannya tentang uji coba demplot pertanian padi dengan pupuk non subsidi.

Memang harga pupuknya lebih mahal, tapi hasilnya meningkat dua kali lipat dan keuntungan petani juga naik berlipat.

"Terlebih, jika gabah hasil panen langsung masuk mesin pengering, kualitas beras menjadi premium dan potensi kehilangan menjadi zero," cetusnya. ■ ONI

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☒ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

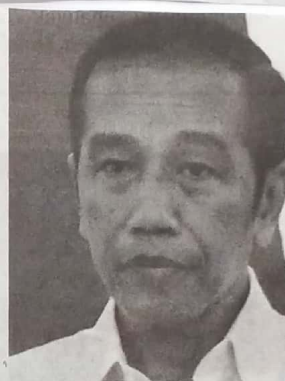
MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Jokowi: Kembangkan Agromaritim Berbasis Inovasi dan Teknologi

Oleh Novy Lumanauw 10-7

► JAKARTA – Presiden Joko Widodo mendorong pengembangan potensi agromaritim dengan berbasis pada penerapan inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi menjadi sangat penting karena Indonesia tengah menghadapi tren pertanian 4.0 dan tantangan pembangunan di bidang pertanian dan pangan yang semakin kompleks. Dengan langkah itu diharapkan bisa dihasilkan berbagai solusi cerdas yang mampu menyejahterakan petani-nelayan, memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kemandirian di sektor pangan, serta menjadi modal bagi Indonesia untuk cepat keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19.



Joko Widodo

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato secara daring pada Dies Natalis ke-58 IPB University dari Istana Merdeka Jakarta, Rabu (1/9). Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan yang sangat besar, tapi itu belum tergarap dengan baik. Indonesia baru mengisi 3% dari pasar ikan dunia yang nilainya sudah mencapai US\$ 162 miliar. "Dengan potensi yang sangat besar itu, kita harus fokus untuk mengembangkan agromaritim berbasis inovasi dan teknologi. Kita harus mempercepat agromaritim 4.0: ke pertanian modern (*smart*

dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, *machine learning*, teknologi robotik, dan *automation*," ungkap Presiden Jokowi.

Jokowi menuturkan, pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, seluruh elemen bangsa bisa melihat dan merasakan pentingnya inovasi untuk keluar lebih cepat dari persoalan dan menang dalam persaingan. Di sektor pertanian pangan, inovasi menjadi sangat penting karena saat ini Indonesia menghadapi tren pertanian 4.0 dan tantangan pembangunan di bidang pangan dan pertanian yang semakin kompleks. Pemerintah sendiri terus berupaya mengubah pola pikir petani nasional dari pertanian tradisional

(*farming*). Selain terus mengembangkan dan melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi produksi dan sistem distribusi.

Karena itu, demi menghasilkan solusi-solusi cerdas berbasis teknologi informasi sebagai terobosan penting untuk menyejahterakan petani dan nelayan maka Presiden menaruh harapan besar kepada IPB dalam menghasilkan lebih banyak lagi solusi cerdas yang akan memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kemandirian sektor pangan sekaligus bisa menjadi modal penting untuk keluar dari krisis. "IPB harus terus berkreasi dan berinovasi untuk membantu mewujudkan Indonesia sebagai negara agraris dan maritim yang mandiri, maju,

kuat dan menjadi pemenang dalam persaingan global," kata Jokowi.

Secara khusus Jokowi mengajak seluruh sivitas akademika IPB menjadikan IPB sebagai kampus pelopor inovasi, menciptakan ruang yang makin nyaman bagi pemikiran dan karya-karya inovatif, terus menemukan inovasi yang memberikan solusi cerdas bagi masyarakat, khususnya peningkatan kesejahteraan para petani serta memperkuat hilirisasi riset dan inovasi dengan membangun jalinan yang kuat bersama dunia industri. Dengan begitu, IPB akan terus menjadi garda terdepan dalam penyelesaian masalah pangan dan pertanian di Indonesia, berkontribusi menghasilkan *smart shortcut* dalam peningkatan daya saing negara Indonesia di bidang pangan dan pertanian sehingga Indonesia menjadi negara yang maju dan berdikari di bidang pangan.

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki banyak potensi di sektor pangan yang belum dikembangkan secara optimal. Untuk itu, semua pihak perlu lebih banyak melakukan inovasi guna meningkatkan produktivitas, inovasi untuk meningkatkan kualitas, inovasi untuk substitusi ekspor, inovasi untuk meningkatkan daya saing produk pangan, obat herbal, buah-buahan, dan potensi-potensi agromaritim lainnya. "Dan saya senang mendengar IPB telah mengembangkan agenda riset

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☒ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 27/01/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

dan pengembangan agromaritim. Ini sebuah langkah besar yang sangat strategis, karena saya melihat masa depan negara kita ada pada pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan," jelas Jokowi.

Model Ekonomi Baru

Sementara itu, Rektor IPB University Arif Satria mengatakan, dunia tengah menghadapi tiga disrupsi besar, yakni perubahan iklim, revolusi industri 4.0, dan pandemi Covid-19, dan masing-masing telah melahirkan model ekonomi baru. Terkait perubahan iklim misalnya, telah mendorong manusia untuk lebih peduli pada alam dan lingkungan karena dampaknya telah dirasakan, seperti bencana alam banjir dan kekeringan, juga munculnya krisis energi dan air bersih. Disrupsi akibat adanya perubahan iklim ini memunculkan model ekonomi hijau (pertanian), ekonomi biru (kelautan), dan ekonomi sirkular.

Khusus disrupsi akibat pandemi Covid-19, Arif mengata-

kan, pandemi telah mengubah banyak hal, mulai dari cara hidup, belajar atau bekerja, hingga ekonomi dan ekologi. Meski pandemi meningkatkan kebutuhan air dan listrik, tapi pandemi juga telah membantu menurunkan emisi karbondioksida. Disrupsi akibat pandemi telah memunculkan model ekonomi normal baru (*new normal economy*). Model ini memiliki sejumlah karakteristik, antara lain fokus pada agromaritim, menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru, dan memunculkan perilaku manusia yang sehat dan hijau untuk mendukung konsumsi berkelanjutan. "Agromaritim dikembangkan sebagai respons terhadap tuntutan kemandirian pangan. Hal itu mengingat selama pandemi sejumlah negara menahan stok pangan mereka dan kemandirian pangan kini telah menjadi komitmen global. Kenapa agromaritim, itu karena saat pandemi sektor agromaritimlah yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi," kata Arif. (tl)

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 2/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Ando Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Harga Gabah Petani Naik 3,19%

JAKARTA – Rerata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani selama Agustus 2021 mencapai Rp 4.448 per kilogram (kg) atau naik 3,19% dan di tingkat penggilingan Rp 4.545 per kg atau naik 3,12% dari harga gabah kualitas sama pada bulan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani pada Agustus 2021 juga naik 3,37% menjadi Rp 5.038 per kg dan di tingkat penggilingan Rp 5.148 per kg atau naik 2,92%. Harga gabah di luar kualitas di tingkat petani Rp 4.242 per kg atau naik 6,62% dan di tingkat penggilingan Rp 4.341 per kg atau naik 6,60%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 1.813 transaksi penjualan gabah di 28 provinsi selama Agustus 2021 yang terdiri atas transaksi GKP 64,75%, lalu GKG 20,19%, dan gabah luar kualitas 15,06%. Dibandingkan Agustus 2020, rata-rata harga gabah pada Agustus 2021 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun 7,67%, lalu 6,64%, dan 5,68%. Sedangkan di tingkat penggilingan, rata-rata harga gabah pada Agustus 2021 dibandingkan dengan Agustus 2020 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 7,34%, lalu 6,68%, dan 5,41%.

Selama Agustus 2021, BPS juga melakukan survei harga produsen beras di penggilingan terhadap 1.173 observasi beras di penggilingan pada 888 perusahaan penggilingan di 31 provinsi. Pada Agustus 2021, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan Rp 9.499 per kg atau



Kuntoro Boga Andri

naik 1,04% dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan Rp 8.916 per kg atau naik 0,32%, sedangkan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan Rp 8.689 per kg atau naik 2,44%. Dibandingkan Agustus 2020, rata-rata harga beras di penggilingan pada Agustus 2021 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing turun 4,65%, lalu 4,49%, dan 3,31%.

Dalam publikasi BPS, Rabu (1/9), juga disebutkan, nilai tukar petani (NTP) nasional pada Agustus 2021 mencapai 104,68 atau naik 1,16% dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 1,17% atau lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,01%. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga men-

unjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. "Harga gabah di tingkat petani yang terbilang baik pada Agustus diikuti dengan stabilnya harga komoditas itu telah menguntungkan para petani di Tanah Air," kata Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri dalam keterangannya, kemarin.

Secara nasional, NTP Januari-Agustus 2021 sebesar 103,47 dengan nilai It sebesar 111,44 sedangkan Ib sebesar 107,71. Pada Agustus 2021,

NTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung naik tertinggi (3,68%) dibandingkan provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Kepulauan Riau turun terbesar (1,41%) dibandingkan provinsi lainnya. Pada Agustus 2021 terjadi penurunan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia sebesar 0,05% yang disebabkan oleh penurunan indeks pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Agustus 2021 sebesar 104,80 atau naik 1% dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Harga Cabai

Pada bagian lain, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang Sugiharto mengatakan, produksi aneka cabai nasional mengalami surplus. Produksi cabai pada Juli 2021 mencapai 163.293 ton dengan kebutuhan 158.855 ton sehingga

terdapat surplus 4.439 ton. Penurunan harga cabai tidak lepas dari permintaan hotel, restoran, dan katering yang juga berkurang karena dampak pandemi Covid-19.

Siklus harga cabai memang naik turun karena musiman dan harus cepat dijual apabila tidak maka barangnya cepat rusak dan tidak bisa dikonsumsi lagi. Untuk harga cabai rawit merah di tingkat petani pada Januari masih Rp 50 ribu per kg, Februari Rp 80 ribu per kg, harga kembali turun menjadi Rp 50 ribu per kg pada April. Harga cabai pada Juni Rp 20 ribu per kg dan pada Agustus Rp 10 ribu per kg. "Untuk balik modal, petani memerlukan harga jual cabai rawit Rp 11-13 ribu per kg. Kami telah melakukan penyerapan 10 ton dan industri pun ikut menyerap hasil produksi petani, antara lain Indofood yang menyerap 10 ton per hari," ungkap Bambang. (ark/dho/tl) 10-7

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 2/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Kesejahteraan Petani Meningkat

Besarnya penyerapan hasil panen dapat menjaga kestabilan harga sehingga meningkatkan pendapatan petani.

DESPIAN NURHIDAYAT

despian@mediaindonesia.com

NILAI tukar petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan para petani terus meningkat. Pada Agustus 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP naik 1,16% ke level 104,68 secara bulanan dari posisi sebelumnya 103,40 di Juli 2021. **MI: 2**

Kenaikan itu dipengaruhi lonjakan NTP di subsektor tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan subsektor perikanan seperti nelayan serta pembudi daya ikan.

"Kalau kami rinci setiap subsektor, NTP tanaman pangan mengalami peningkatan 1,39% karena kenaikan indeks di Juli 2021 sebesar 96,31, pada Agustus meningkat jadi 97,65," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, NTP subsektor

tanaman perkebunan rakyat meningkat 2,90% berkat kenaikan indeks di Agustus menjadi 122,55 dari 119,10 pada Juli.

"Jika melihat keseluruhan subsektor pertanian, terdapat dua subsektor yang NTP-nya menurun, yaitu hortikultura turun 1,42% karena penurunan indeks di Agustus menjadi 100,01 dari bulan sebelumnya 101,45,"

lanjut Margo.

Selain NTP, BPS juga melihat perkembangan nilai tukar usaha pertanian (NTUP). Perbedaan dengan NTP ialah dari nilai harga yang dibayarkan petani.

"Kami memerinci tidak termasuk yang dikonsumsi rumah tangga. Jadi, NTUP memang benar-benar untuk usaha pertanian, termasuk pembelian barang modal," ujar Margo.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir NTP bertahan di kisar-

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Harga Gabah 2021

Tren NTP 2021

Bulan	NTP
Januari	103,26
Februari	103,10
Maret	103,29
April	102,93
Mei	103,39
Juni	103,59
Juli	103,48
Agustus	104,68

Subsektor NTP yang Mengalami Kenaikan

- Tanaman pangan: **1,39%**
- Tanaman perkebunan rakyat: **2,90%**
- Perikanan: **0,58%**



Tren Harga Gabah di Tingkat Petani 2021

Bulan	GKG	GKP
Januari	5.318	4.921
Februari	5.320	4.758
Maret	5.214	4.385
April	4.882	4.275
Mei	4.994	4.398
Juni	4.964	4.546
Juli	4.874	4.311
Agustus	5.038	4.448

Keterangan:

- GKG: Gabah kering giling
- GKP: Gabah kering panen
- Harga GKG dan GKP dalam satuan rupiah per kg

Sumber: BPS/Litbang MI/Grafiis: D

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 2/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

an 100-103. Petani memiliki andil pada besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian, terutama di tengah pandemi.

"Di saat semua sektor terpuruk, sektor pertanian memberi peran positif bagi negara. Ini membanggakan dan berkat kerja keras semua pihak, terutama petani di lapangan," ungkap Syahrul.

Serapan besar

Dalam menanggapi kenaikan NTP, pengamat pertanian dari IPB Hermanto Siregar mengatakan kenaikan NTP mengindikasikan rata-rata harga yang diterima petani relatif meningkat jika dibandingkan dengan rata-rata harga yang mereka bayar.

"Artinya, bagus bagi petani. Namun, indikator NTP ini juga harus diinterpretasikan secara hati-hati. Beberapa komoditas pertanian seperti cabai akhir-akhir ini produksinya meningkat, tetapi harganya anjlok melebihi kenaikan produksi tersebut. Ini justru merugikan

petani," papar Hermanto.

Mengenai padi, Hermanto membenarkan pada Juli-Agustus merupakan musim panen. Akan tetapi, penyerapan gabah petani kurang memadai. Hingga akhir tahun dia memproyeksikan tanaman pangan khususnya padi masih akan relatif stabil.

"Penyerapan lebih besar dapat menjaga kestabilan harga petani sehingga meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan para petani," kata Hermanto.

BPS melaporkan rata-rata harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) di tingkat petani mengalami kenaikan 3,19% dan 3,37% secara bulanan.

Rerata harga GKP di tingkat petani pada Agustus Rp4.448 per kilogram atau naik 3,19% jika dibandingkan dengan Juli yang sebesar Rp4.311. Adapun rerata harga GKG di tingkat petani pada Agustus naik 3,37% menjadi Rp5.038 dari Rp4.874 per kilogram pada Juli. (Try/X-3)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 2/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

BRIN, Mengatasi Masalah dengan Masalah

Erizal Jamal

Profesor riset Kementan/Ketua Perhepi

JAGAT peneliti di berbagai kementerian dan lembaga negara saat ini sedang resah. Hal itu disebabkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor B/295/M.SM.02.03/2021, tertanggal 22 Juli 2021, tentang Pengalihan Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga (K/L) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Edaran itu meminta BRIN melakukan pemetaan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi peneliti dari K/L. Pada saat bersamaan K/L memilah mana peneliti yang dialihkan ke BRIN dan yang tetap di K/L karena berbagai alasan. Peneliti yang tidak pindah ke BRIN tidak lagi diakui sebagai peneliti fungsional. Semua proses itu ditargetkan selesai akhir Desember 2022.

Surat edaran menpan-RB tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN. Perpres itu merupakan terjemahan dari Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), terutama pada ayat 1 yang berbunyi 'Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional'.

Perdebatan yang berkembang terkait dengan terjemahan dari ayat 1 di atas terutama untuk kata terintegrasi. Pemerintah melalui Perpres Nomor 33 Tahun 2021 menerjemahkannya dengan menyatukan semua peneliti fungsional di bawah pengelolaan BRIN. Pada tahap awal dilakukan pada empat lembaga penelitian nonkemen-

terian, yaitu LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan. Menurut data Badan Kepegawaian Negara, proses ini akan melibatkan sekitar 10.610 aparatur sipil negara (ASN).

Belum ada angka pasti ASN yang ada di 48 lembaga penelitian K/L. Sebagai gambaran saja, di lembaga penelitian Kementerian Pertanian, ada 5.437 orang ASN, dengan 1.539 merupakan peneliti fungsional. Proses penyatuan itu akan menjadikan BRIN sebagai lembaga 'super' dengan jumlah ASN yang sangat banyak.

Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh upaya ini sejalan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek? Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Mekanisme koordinasi

Bila dicermati dengan saksama, minimal ada dua alasan di balik perubahan undang-undang yang mengatur kegiatan riset. Pertama, terkait dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana riset, yang di Indonesia menurut beberapa kalangan jumlahnya masih terbatas. Jumlah dana riset yang terbatas tersebut belum digunakan dengan baik, dalam artian hasil risetnya belum terlihat. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan mempertanyakan hal itu.

Kedua menyangkut keterpaduan proses pelaksanaan riset itu sendiri. Pelaksanaan riset terpecah dalam banyak lembaga dan belum terkoordinasi dalam suatu sistem yang baik. Akibatnya, banyak kegiatan riset yang tumpang-tindih dan hasilnya tidak banyak terkait dengan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.

Secara rinci, uraian tentang alasan peru-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 2/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 6 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

bahan itu dapat dilihat pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sisnas Iptek, yang diterbitkan Kemenristek-Dikti Republik Indonesia, 2017. Disebutkan bahwa perubahan perlu dilakukan karena UU No 18 Tahun 2002 belum mengatur mekanisme koordinasi antarlembaga dan sektor pada level *agenda setting*, level perencanaan program-anggaran, serta level pelaksanaan.

Selain itu, belum diatur aspek pembinaan pemerintah terhadap kelembagaan, SDM, serta jaringan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (litbangjirap iptek).

Penyusunan undang-undang baru diarahkan ke penguatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi. Selain itu, memberikan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan iptek. Integrasi dan simplikasi kebijakan di bidang iptek berkaitan dengan keterpaduan mengatasi tumpang-tindih dan efisiensi serta efektivitas pendanaan riset.

Dari apa yang termaktub dalam naskah akademik tersebut, terlihat bahwa penekanannya pada mekanisme koordinasi, integrasi, dan simplikasi kebijakan sehingga penafsiran dalam bentuk peleburan semua lembaga riset di bawah BRIN perlu ditinjau lagi secara cermat.

Beban birokrasi

Hal lain yang dikhawatirkan dari semangat yang berkembang dengan pembentukan BRIN saat ini ialah beban birokrasi yang harus ditangani pada awal pendiriannya. Penyatuan dalam bentuk peleburan, yang tecermin pada perpres serta surat edaran menpan-RB, mengisyaratkan bahwa integrasi tidak hanya terkait sumber daya peneliti, tetapi juga perlengkapan/infrastruktur dan aset yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga.

Bila demikian adanya, proses ini menjadi tidak mudah. Pengalaman dari penggabungan beberapa lembaga sebelumnya menunjukkan butuh beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Kondisi itu dikhawat-

irkan akan menyita energi BRIN. Dengan struktur organisasi dan perangkat pendukung yang belum optimal, dikhawatirkan BRIN terjebak dalam beban birokrasi pengelolaan SDM dan aset. Pada situasi seperti ini upaya perbaikan fungsi koordinasi, untuk mengatasi masalah tumpang-tindih serta efisiensi anggaran riset, bisa jadi belum tergarap secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, disarankan penahapan proses integrasi. Pertama, BRIN memfokuskan diri dalam menyusun kerangka besar terkait dengan pola pendataan dan pendanaan riset. Pendataan utamanya untuk menunjang sistem perencanaan dan pengembangan riset itu sendiri. Basis data riset yang baik, dikaitkan dengan beragam pengembangan seperti publikasi dan lainnya, diharapkan dapat meminimalkan duplikasi riset.

Sementara itu, untuk pendanaan, BRIN diharapkan dapat melahirkan beragam skim pembiayaan riset, yang sejalan dengan siklus pelaksanaan riset. Beragam skim itu dapat langsung dikaitkan dengan *output* atau *outcome* dari kegiatan riset, yang sejalan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui skim tersebut, upaya pengaitan riset dengan aktivitas industri akan mudah dilakukan.

Kedua, BRIN perlu menata ulang proses integrasi dengan meninjau ulang surat edaran menpan-RB. Integrasi K/L ke dalam BRIN diawali dengan integrasi program, yang didukung integrasi pembiayaan dan pembinaan peneliti. Pengalaman pada era Kementerian Ristek, integrasi program riset nasional yang difasilitasi Dewan Riset Nasional tidak dapat berjalan karena tidak didukung pola pembiayaan dan pembinaan peneliti.

Ketiga, BRIN yang didukung empat lembaga penelitian nonkementerian membangun model pelaksanaan riset yang terintegrasi dan tuntas. Ini menjadi *role model* dan barometer bagi proses integrasi lembaga penelitian K/L ke dalam BRIN. Penahapan ini akan memaksimalkan peran BRIN dalam proses integrasi. Ketersambungan kegiatan riset dan industri, untuk memaksimalkan nilai tambah kekayaan alam, dan bersaing secara global, dapat segera diwujudkan.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☒ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 2/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



Bulir Padi dalam Catatan Sejarah Negeri

Padi, Sumber Makanan Pokok Mayoritas Masyarakat Indonesia

Padi sejak zaman nenek moyang sudah menjadi makanan pokok bangsa ini, terbukti dari pahatan pada relief candi Borobudur. Pada masa kolonial Hindia Belanda (VOC), Jawa, Lombok, Sulawesi Selatan, dan Sumbawa menjadi kantong-kantong produksi beras. Namun, meski saat itu jumlah produksi beras cukup besar bahkan diekspor, masyarakat setempat lebih memilih sumber pangan yang lebih murah macam singkong dan jagung. Sedangkan beras dianggap komoditas utama perdagangan.

Produksi padi nasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI tahun 2020, produksi gabah kering giling (GKG) Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 54,6 juta ton atau setara beras 31,3 juta ton. Sementara itu, total kebutuhan beras untuk konsumsi masyarakat Indonesia dalam setahun sebanyak 29,2 juta ton sehingga secara nasional produksi beras surplus sebanyak 1,9 juta ton. BPS mencatat kinerja produksi padi relatif terjaga sepanjang tahun 2020.

Ragam padi

Masyarakat menggolongkan beras menjadi tiga golongan, yakni beras putih, beras hitam dan beras merah. Konsumsi beras merah dan beras hitam masih cukup rendah dan pada umumnya dikonsumsi karena pertimbangan kesehatan dan diet. Beras hitam dan beras merah memiliki kandungan karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan dengan beras putih, tetapi memiliki nilai energi yang lebih tinggi serta kaya akan protein.

Beras putih paling banyak variannya. Beberapa macam beras putih yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, antara lain sebagai berikut.

- **Beras pandan wangi.** Memiliki aroma khas yang membuat



nafsu makan bertambah. Varian beras ini pun juga akan sangat pulen setelah ditanak.

- **Beras rojolele.** Sangat pulen setelah ditanak. Beras rojolele juga punya aroma yang harum meskipun tidak seharum pandan wangi.
- **Beras setra ramos.** Nama lainnya IR64. Beras ini sering jadi pilihan karena harganya yang sangat terjangkau.
- **Beras IR42.** Beras yang satu ini paling pas untuk dimasak menjadi nasi goreng, nasi uduk, lontong, dan ketupat.
- **Beras batang lembang.** Sering disebut beras Jepang. Bentuknya lebih panjang setiap butirnya dan berwarna putih bersih.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☒ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 2/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Ekosistem bisnis padi

BRI telah membina lebih dari 90 ribu kelompok tani (poktan) dengan jumlah lebih dari 5,5 juta petani yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Untuk menggarap ekosistem padi, BRI bekerja sama dengan berbagai pemegang kepentingan (*stakeholder*), salah satunya Kementerian Pertanian (Kementan) RI terkait penyaluran pupuk bersubsidi lewat Kartu Tani. Petani juga dapat memanfaatkan Kartu Tani untuk keperluan lain, seperti pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) dan transaksi perbankan lainnya. Hingga kini terdapat 5 juta petani yang menerima Kartu Tani BRI.

JUMLAH KARTU TANI



Untuk mempermudah akses layanan pembayaran, BRI juga telah menjadikan lebih dari 7.500 Kios Pupuk Lengkap (KPL) di berbagai wilayah sebagai agen laku pandai (AgenBRILink). Dengan begitu, para petani dapat dengan mudah mengakses pembayaran pupuk bersubsidi dan layanan perbankan sekaligus.

Sebagai proses monitoring, BRI mengembangkan Sistem Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) dan Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI), sistem informasi yang mendetail berupa database petani, seperti identitas, musim tanam, luas lahan, komoditas, alokasi kuota pupuk subsidi di bermacam wilayah yang tercatat dengan baik. SIMPI dan SINPI membantu

Pemerintah mengakses informasi transaksi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran sehingga dapat dijadikan bahan untuk menetapkan arah kebijakan pada area ketahanan pangan.

Di samping itu, dikembangkan juga aplikasi Panen yang bekerja sama dengan dinas pertanian untuk memonitor musim tanam dan perkiraan musim panen beberapa komoditas pangan, termasuk padi di suatu wilayah.

BRI juga telah memperkuat bisnis pengolahan padi di beberapa lokasi. Salah satunya, penguatan *business matching* antara Rice Milling Unit (RMU) yang dikelola oleh Koperasi Citra Kinaraya yang berperan sebagai *off-taker* dengan para petani di wilayah Demak, Jawa Tengah. Dengan kapasitas 1.445 ton per musim, RMU Koperasi Citra Kinaraya dapat menyerap hasil panen dari seluruh mitra poktan yang berada di sekitar RMU tersebut.

"BRI terus berkomitmen dalam mendukung pengembangan bisnis model ekosistem kelompok/kluster dengan berbagai komoditas, khususnya 8 komoditas prioritas yang menjadi *concern* Kementerian BUMN," ujar Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari.

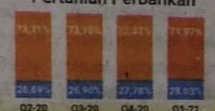
Kontribusi Kredit BRI pada Sektor Pertanian

Tren Kredit Pertanian (Rp Triliun)



Growth kredit BRI di sektor pertanian sebesar **12,8%** (yoy)

Share Kredit BRI di Sektor Pertanian Perbankan



Maret 2021, share kredit pertanian BRI mencapai **28,03%** terhadap total kredit perbankan nasional di sektor pertanian

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

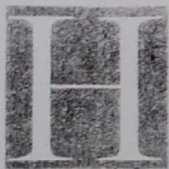
SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 2/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 6 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Di Balik Petai, Jengkol, dan Asiri



arian ini mengangkat diplomasi ekonomi melalui berbagai komoditas. Dampaknya, neraca perdagangan selama 15 bulan atau sejak Mei 2020 membukukan surplus.

Salah satu komoditas ekspor yang menjadi sorotan adalah komoditas pertanian. Komoditas ini menghidupi banyak orang, mulai dari petani, pedagang, hingga eksportir. Beberapa komoditas itu adalah petai, jengkol, dan minyak asiri. Ada pula komoditas baru, seperti bawang daun, buah tempayan, bunga krisan, kecombrang, manisan kelapa, masohi, sirih, dan andaliman. Komoditas baru ini umumnya digarap oleh eksportir dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Beberapa daerah mampu mengirim komoditas baru. Petani di Sumatera Utara untuk kali pertama menembus ekspor petai dan jengkol. Nilainya masih kecil, tetapi hal ini sebuah terobosan.

Pandemi Covid-19 ikut mendorong permintaan minyak asiri di sejumlah daerah. Selain untuk memenuhi pasokan di dalam negeri, minyak asiri juga diekspor. Jalan panjang cukup berliku dihadapi petani penghasil minyak itu. Harga minyak asiri terdongkrak naik. Keadaan ini membuat budidaya nilam, salah satu minyak asiri, di Sumatera Barat bergairah.

Harga minyak asiri nilam memang sedang bagus sejak dua tahun lalu. Sekarang, harga minyak asiri antara Rp 580.000-Rp 600.000 per kilogram di tingkat petani. Sebelumnya, harga dengan berat yang sama hanya Rp 300.000.

Kita tentu menyambut baik perkembangan ini. Petani di berbagai daerah menjadi bergairah karena mendapatkan penghasilan yang meningkat. Komoditas pertanian asal Indo-

nesia juga berhasil masuk ke berbagai negara sehingga meningkatkan keberagaman produk ekspor. Di tengah pandemi, perbaikan ekspor tentu menjadi berkah tersendiri.

Kita perlu meneliti lebih mendalam tentang kecenderungan kenaikan permintaan terhadap produk yang mungkin aneh di mata kita. Sekian tahun kita menyepelekan petai, jengkol, dan berbagai produk minyak asiri, kini pasar internasional malah mencari produk itu. Sejumlah negara memburu komoditas itu seharusnya memunculkan pertanyaan. K-6

Bahkan, kita perlu belajar terkait kelapa dan produk turunannya. Sekian tahun kelapa tidak mendapat perhatian, tetapi kini semua bagian kelapa, mulai dari serabut, batok, isi, hingga air kelapa diminati pasar global. Permintaan melonjak, tetapi perkebunan kelapa telah banyak yang rusak. Ekosistem perdagangan kelapa tidak berkembang.

Salah satu pertanyaan yang perlu kita ajukan, untuk apakah komoditas-komoditas itu diburu oleh berbagai negara? Kita perlu meneliti lebih lanjut kemungkinan pemanfaatannya di dunia medis. Sampai sejauh ini, riset dan pencarian berbagai bahan terus dilakukan untuk menjawab berbagai masalah medis. Oleh karena itu, kita perlu menyelidiki pemanfaatan petai, jengkol, dan minyak asiri untuk keperluan kesehatan. Berbagai negara kemungkinan mencari bahan aktif dari bahan-bahan itu. Untuk itu, sebaiknya kita sendiri meneliti dan mencari bahan aktif yang berbasis tanaman tropis.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☒ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 2/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

SUARA PEMBACA

Pertanian Tetap Kokoh

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah soko guru ekonomi bangsa ini, yaitu pertanian dan berikut para petani di dalamnya. Singkatnya, luar biasa sekali daya tahan sektor pertanian dalam menghadapi terjangan pandemi yang sudah berlangsung setahun lebih ini. Siapa dapat menyangkal

bahwa urusan pangan selalu hadir di setiap pengeluaran rumah tangga. Apalagi Indonesia adalah negara agraris yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Sebagai negara agraris yang membentang dari barat hingga ke timur, negeri kita ini seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. *B. I. 2*
Saya termasuk orang yang sulit

menerima pandangan bahwa pertanian di dalam negeri hanya tinggal mitos. Anggapan ini sama sekali tidak benar, karena pertanian terlihat makin kokoh di tengah pandemi.

Indonesia sebagai negara agraris tetap dapat mengandalkan pertaniannya secara mandiri. Namun perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk mewujudkan pertanian yang tangguh dan

modern.

Kuncinya, komitmen tinggi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan serta implementasi kebijakan yang tepat, terutama dalam memajukan pertanian dalam negeri. Yakinlah masih terbuka luas potensi dan harapan di depan sana.

R.H. Khairudin
Gandaria Selatan, Jakarta